

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa negara, termasuk Indonesia, menghadapi berbagai isu terkait kependudukan. Permasalahan ini sangat kompleks dan mencakup berbagai hal, seperti tingginya angka pernikahan usia dini, angka kematian bayi dan ibu melahirkan, serta pesatnya laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,696 juta jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,13% dibandingkan tahun 2022, yang saat itu tercatat sebanyak 275,773 juta.¹

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak terkendali dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat kebijakan Keluarga Berencana (KB). Program ini bertujuan untuk menekan laju kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi dasar hukum bagi program Keluarga Berencana. Berdasarkan undang-undang ini, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memiliki kewenangan yang lebih luas. Kini, BKKBN tidak hanya

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia

berfokus pada pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, tetapi juga bertugas untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk secara keseluruhan.

Meskipun pemerintah sudah menjalankan program Keluarga Berencana (KB), program ini belum sepenuhnya berhasil. Masih ada beberapa masalah yang menghambatnya, seperti penurunan jumlah peserta, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB, dan kurangnya sosialisasi yang merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah, terutama BKKBN, perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah agar ikut serta dalam pelaksanaan program KB. Dengan melibatkan pemerintah daerah, diharapkan target program bisa tercapai lebih kuat, salah satunya melalui pembentukan Program Kampung Keluarga Berencana.²

Dusun Jenawi di Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, menjadi lokasi pertama Program Kampung KB di Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data tahun 2015 yang menunjukkan masalah serius: dari 564 Pasangan Usia Subur (PUS), hanya 290 yang aktif sebagai peserta KB. Rendahnya partisipasi ini mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Selain itu, faktor sosial-ekonomi, di

² Justang Fariel. 2020. Analisis Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Studi Pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita). Skripsi Universitas Islam Riau

mana mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan dan pedagang kecil, memperkuat alasan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada 14 Januari 2016, pemerintah menetapkan Dusun Jenawi sebagai Kampung KB pertama di Indonesia. Peresmian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yang menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan keluarga di tingkat desa. Pemilihan Dusun Jenawi sebagai lokasi percontohan didasarkan pada beberapa faktor, seperti: Kondisi kependudukan yang kompleks, Dukungan kuat dari tokoh dan kader lokal, Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembentukan Kampung KB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selain itu, landasan hukum lainnya adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB, serta Surat Kepala BKKBN Pusat Nomor 046/BL/200/B4/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang mengatur pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia.³ Total keseluruhan Kampung KB di Indonesia sampai saat ini sudah mencapai 48.179 kampung.

Pada prinsipnya, meskipun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN, program ini sebenarnya merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat tidak hanya BKKBN, tetapi juga kementerian dan pemerintah daerah

³ Ingrid K. Rompis. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM UPAYA KESEJAHTRAAN MASYARAKAT DI DESA KAPOYA KECAMATAN SULUUN

terkait, mitra kerja, serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, Kampung KB diharapkan menjadi gambaran nyata dari sebuah wilayah di mana program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berpadu dengan program pembangunan sektor lainnya secara terstruktur dan sistematis. Hal ini sejalan dengan definisi Kampung KB itu sendiri, yaitu "suatu wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, dengan kriteria tertentu, di mana program KKBPK dan pembangunan sektor terkait diintegrasikan secara sistemis dan sistematis".⁴

Program Kampung KB merupakan wujud nyata dari tiga agenda prioritas (Nawacita) Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu:

- Nawacita ke-3: Membangun Indonesia dari daerah pinggir dengan memperkuat wilayah dan desa.
- Nawacita ke-5: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Nawacita ke-8: Melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan pendidikan yang mengedepankan aspek kewarganegaraan, sejarah, patriotisme, cinta Tanah Air, semangat bela negara, dan budi pekerti.⁵

Awalnya, program ini dikenal sebagai Kampung Keluarga Berencana. Namun, namanya berubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas setelah adanya surat edaran

⁴ TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *Jurnal Administrasi Publik*. No.116 Vol. VIII Materi Kampung KB.pdf

⁵ Annisa Izzatul. (2018). PEMBERDAYAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) PADA PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (Studi di Kampung Keluarga Berencana Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). *Skripsi*

dari Kemendagri Nomor 843.4/2879/SJ pada 15 April 2020⁶, Perubahan nama tersebut mencerminkan perluasan fokus program. Awalnya, Kampung KB dinilai kurang maksimal karena hanya berfokus pada pengurangan jumlah penduduk. Dengan berganti nama menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, program ini bertujuan untuk mencapai manfaat yang lebih luas, seperti:

- Mengentaskan kemiskinan
- Mensejahterakan masyarakat
- Memenuhi kebutuhan masyarakat melalui integrasi lintas sektor.

Integrasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari swasta, provider, hingga pemangku kepentingan lainnya. Bentuknya berupa pelayanan terpadu yang menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat, seperti layanan KB, pembuatan akta, pembangunan jalan, penyediaan buku, hingga posyandu.

Kampung Keluarga Berkualitas terus dikembangkan di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Kota Padang adalah salah satu kota yang ikut serta dalam program ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Kota Padang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Barat, yaitu sebanyak 919.145 jiwa.⁷

⁶ Natelda, R, dkk. 2023. IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. (<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>) , diakses 20 Juli 2023

⁷ Badan Pusat Statistik <https://padangkota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html> Diakses Tanggal 13 maret 2023, pukul 16.40 WIB.

Tingginya jumlah penduduk di Kota Padang menjadi salah satu alasan utama dibentuknya Program Kampung KB. Untuk memastikan program ini berjalan di seluruh wilayah, Gubernur Sumatera Barat menerbitkan Surat Edaran Nomor 476/313/DPPKBKPS.3/V-2017 mengenai Penguatan Keberadaan Kampung KB di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Melalui surat edaran tersebut, dibentuklah Kampung KB di setiap kecamatan yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan merupakan salah satu Kampung Keluarga Berkualitas yang terletak RW VI di kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan. Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan dibentuk pada September Tahun 2019 dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Lurah Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Nomor 01/SK/RWG-II/KPKB-BKR/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA). Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kampung KB Bukit Karan sebagai lokasi penelitian karena Masyarakat di Kelurahan Rawang memiliki rasa kesadaran dan kepedulian untuk berubah atau bergerak kearah yang lebih maju dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta dalam hal Pembangunan.

Berdasarkan kriteria utamanya, ada dua faktor utama yang menjadi dasar pembentukan Kampung KB:

1. Tingginya jumlah keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) yang melebihi rata-rata tingkat desa/kelurahan.
2. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi di wilayah tersebut.

Dilihat dari kriteria pertama, jumlah keluarga yang tergolong Pra-KS dan KS I di wilayah ini sangat tinggi, yaitu mencapai 340 dari total 950 Kartu Keluarga (KK). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di daerah tersebut berada di atas rata-rata tingkat kelurahan.⁸ Artinya ada 340 KK di Kampung KB Bukit Karan yang dikategorikan sebagai keluarga pra Sejahtera atau miskin.

Selain masalah kemiskinan, penelitian menunjukkan bahwa masih banyak Pasangan Usia Subur (PUS) di Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan yang belum berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB). Rendahnya kesadaran masyarakat ini menjadi faktor penting yang menghambat keberhasilan program, sehingga tujuannya belum tercapai secara optimal. Berikut jenis KB yang diikuti oleh masyarakat Kampung KB Bukit Karan dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut
Metode Kontrasepsi Modern

No.	Jenis KB	Jumlah
1.	IUD / Spiral	67
2.	Implant	90

⁸ Data Inventarisasi Kampung KB Kelurahan Rawang Tahun 2021

3.	Kondom	9
4.	Pil KB	42
5.	Suntik KB	244
6.	MOP / Tubektomi	3
7.	MOW / Vasektomi	64
	Jumlah	519
	Jumlah PUS Keseluruhan	1.056

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan sumber dari pemutakhiran pendataan keluarga diketahui bahwa Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tercatat adalah 1.056. Namun, dari angka tersebut, hanya 519 PUS yang mengikuti program KB modern dan 40 PUS yang menggunakan KB tradisional. Ini berarti ada 497 PUS yang belum menjadi peserta program KB. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran mereka tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi modern.

Pasangan usia subur (PUS) adalah komponen vital dalam struktur sosial masyarakat. Mereka memiliki peran ganda: tidak hanya memengaruhi aspek reproduksi dan pertumbuhan penduduk, tetapi juga menjadi kelompok usia produktif yang berkontribusi signifikan pada kegiatan ekonomi, sosial, dan pembangunan keluarga. Dalam konteks program pemberdayaan masyarakat seperti Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), kehadiran PUS menjadi sentral karena banyak program dirancang untuk mereka.

Jenis pekerjaan yang tersedia di suatu wilayah, khususnya Kampung KB, sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Di Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan masyarakatnya bermata pencaharian ada yang sebagai petani, nelayan, pedagang, PNS, dan pekerja lepas.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

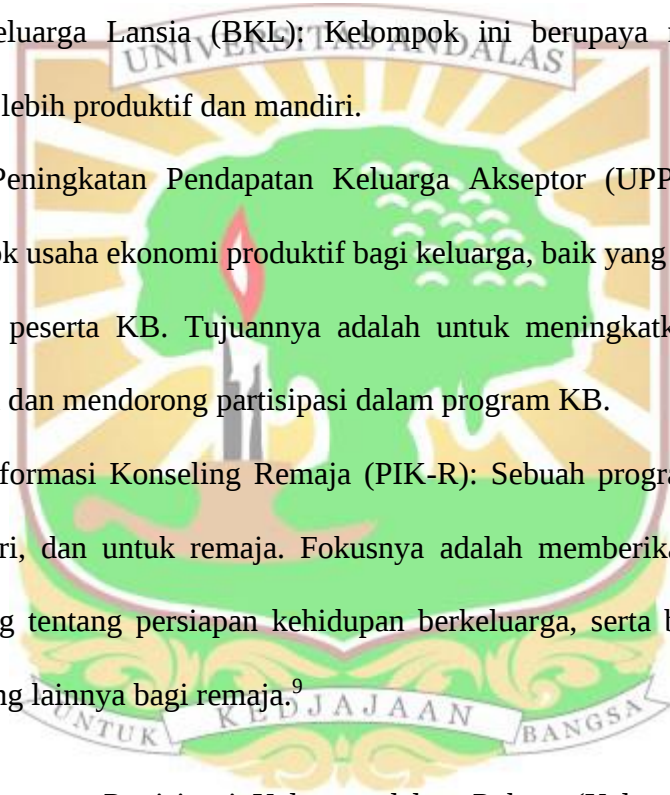
No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Nelayan	19
2.	Pedagang	85
3.	Pekerja Lepas	542
4.	Pegawai Negeri Sipil	85
5.	Petani	10
6.	Tidak Bekerja	507
	Jumlah	1.248

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan sumber dari pemutakhiran pendataan keluarga diketahui bahwa dari jenis pekerjaan yang ada di Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kurangnya jenis pekerjaan dengan pendapatan yang layak, minimnya keterampilan tenaga kerja, dan rendahnya akses terhadap pasar kerja dapat menyebabkan masyarakat terjatuh kemiskinan.

Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan memiliki berbagai Kelompok Kegiatan (Poktan) yang berfokus pada tahapan kehidupan berbeda, antara lain:

- Bina Keluarga Balita (BKB): Kelompok ini ditujukan untuk keluarga yang memiliki anak balita.
- Bina Keluarga Remaja (BKR): Bertujuan meningkatkan pengetahuan orang tua dalam membimbing tumbuh kembang remaja secara seimbang melalui komunikasi yang efektif.
- Bina Keluarga Lansia (BKL): Kelompok ini berupaya membantu lansia menjadi lebih produktif dan mandiri.
- Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA): Ini adalah kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga, baik yang sudah atau belum menjadi peserta KB. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong partisipasi dalam program KB.
- Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R): Sebuah program yang dikelola oleh, dari, dan untuk remaja. Fokusnya adalah memberikan informasi dan konseling tentang persiapan kehidupan berkeluarga, serta berbagai kegiatan penunjang lainnya bagi remaja.⁹

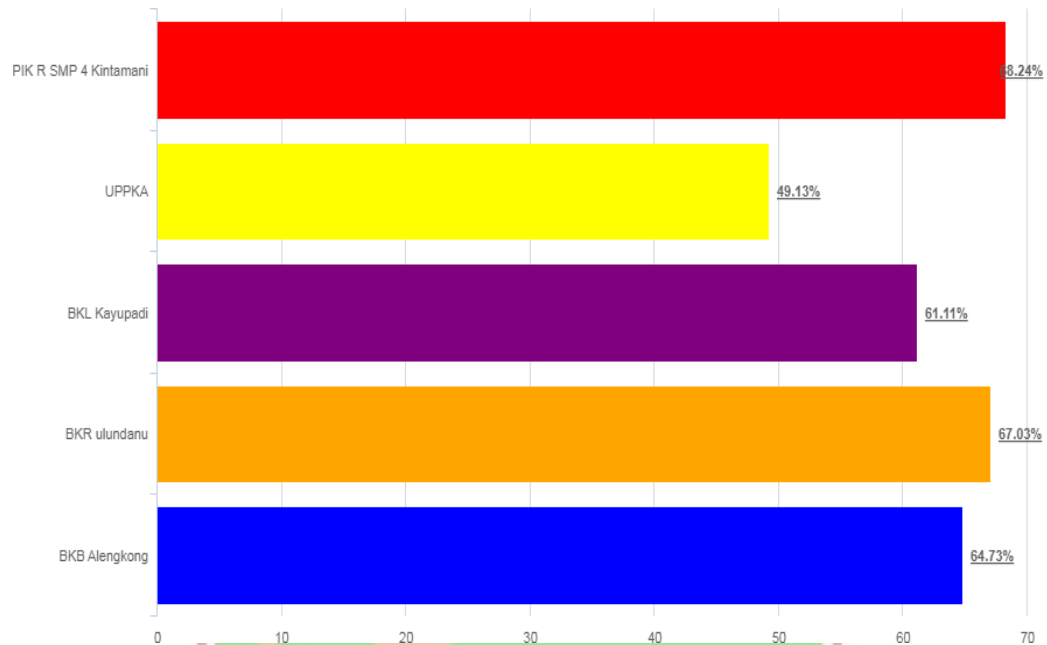


Berikut Persentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan) di Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan :

⁹ BKKBN. 2019. Petunjuk Teknis Kampung KB. Jakarta

Gambar 1.1

Tabel Persentase Poktan Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan



Sumber: Website Kampung KB Bukit Karan, 2023

Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan sudah cukup baik dilihat dari persentasenya yang rata-rata sudah mencapai 50%. Beberapa kegiatan Poktan yang sudah dilakukan adalah mendirikan taman bacaan, Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) untuk mengurangi angka Stunting, mendirikan Paud&TK, membentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dsb.

Pada tahun 2021, Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan dinobatkan sebagai Kampung KB percontohan tingkat Kota Padang. Dua tahun kemudian,

tepatnya pada Juli 2023, prestasi mereka meningkat menjadi Juara 1 Kampung KB Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 1.2
Penghargaan Kampung KB Percontohan dan
Penghargaan Juara 1 Kampung KB Tingkat Provinsi



Sumber: Instagram Kampung KB Bukit Karan, 2023

Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan selama menjalankan Program Kampung KB mendapatkan Juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023. Penghargaan ini didapatkan melalui seleksi atau pemilihan yang dilakukan dengan mengikuti setiap perlombaan seluruh kelompok Bina. Mulai dari tahap tingkat kota, provinsi dan Nasional. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Bapak Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng Deputy Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat yang diserahkan langsung kepada Ketua Pokja Kampung KB Bukit Karan yaitu Bapak Iwan AP. Penghargaan ini dicapai melalui kerja sama dari berbagai *Stakeholder*, serta kerja keras dari masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan.

Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan menjadi lokus penelitian ini dengan alasan:

1. Prestasi dan Pengakuan

- Bukit Karan (Rawang, Padang Selatan) meraih juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun 2023. Sebelumnya juga pernah meraih peringkat kedua pada 2022.
- Keberhasilan ini menunjukkan bukti nyata dari kerja sama lintas sektor dan dedikasi masyarakat setempat yang tinggi, berbeda dengan kampung lain yang belum mencapai prestasi serupa.

2. Inovasi Program dan Lingkup Kegiatan

- Kampung KB Bukit Karan menerapkan berbagai program inovatif:
 - Gerakan penghijauan: menanam pohon produktif seperti durian, petai, jengkol, dan pinus untuk memperindah lingkungan serta mendukung sektor wisata dan ekonomi kreatif lokal.
 - Kegiatan kolaboratif: seperti pelibatan kelompok GENRE Kota Padang dan PIK-R dalam modul edukatif, dialog, seni, dan memasak bersama, yang memperkuat identitas lokal dan keterlibatan pemuda.
- Sebagai perbandingan, kampung KB lain (seperti Kubu Gadang di Padang Panjang) lebih fokus pada pelatihan penguatan kapasitas, intervensi lintas sektor, namun belum ada capaian prestasi provinsi yang sebanding.

3. Konvergensi Lintas Seksi

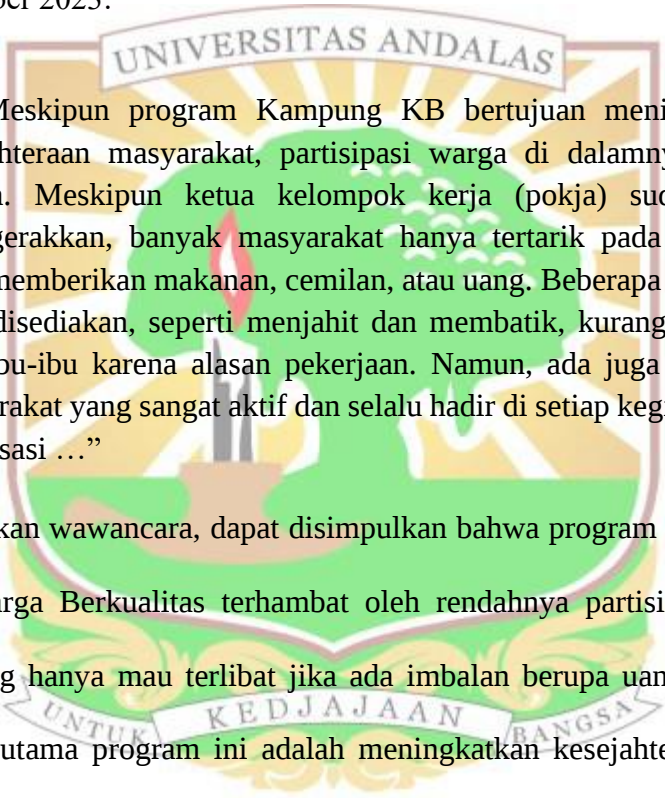
- Bukit Karan menunjukkan tingkat konvergensi lintas sektor yang aktif, dengan dukungan BNNP, Baznas, Dinas Kesehatan, dan anggota dewan dalam menyusun dan melaksanakan program KB.
- Ini memperlihatkan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat lokal yang belum terlihat seintensif itu di kampung KB lainnya.

4. Penyebaran Kampung KB di Kota Padang

- Kota Padang memiliki 104 kampung KB yang tersebar di seluruh kelurahan, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Dasar: 3 kampung
 - Berkembang: 40 kampung
 - Mandiri: 11 kampung
 - Berkelanjutan: 50 kampung

Bukit Karan, dengan status “berkelanjutan”, menjadi contoh unggul dari ratusan kampung KB di kota Padang ini. Kampung KB Bukit Karan di Rawang menonjol sebagai teladan unggulan di Kota Padang dengan berbagai prestasi, inovasi nyata, dan kolaborasi lintas sektor yang memperkuat kualitas hidup masyarakat. Banyak kampung KB lain juga aktif, namun belum mencapai level prestasi dan integrasi seperti Bukit Karan.

Tentunya selama program Kampung Keluarga Berkualitas berjalan ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Ketua Pokja (Kelompok Kerja) beserta anggota kepengurusan Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan, hal ini disampaikan oleh Ibu Dewi sebagai seksi Budaya dalam wawancara peneliti pada tanggal 27 Oktober 2023:



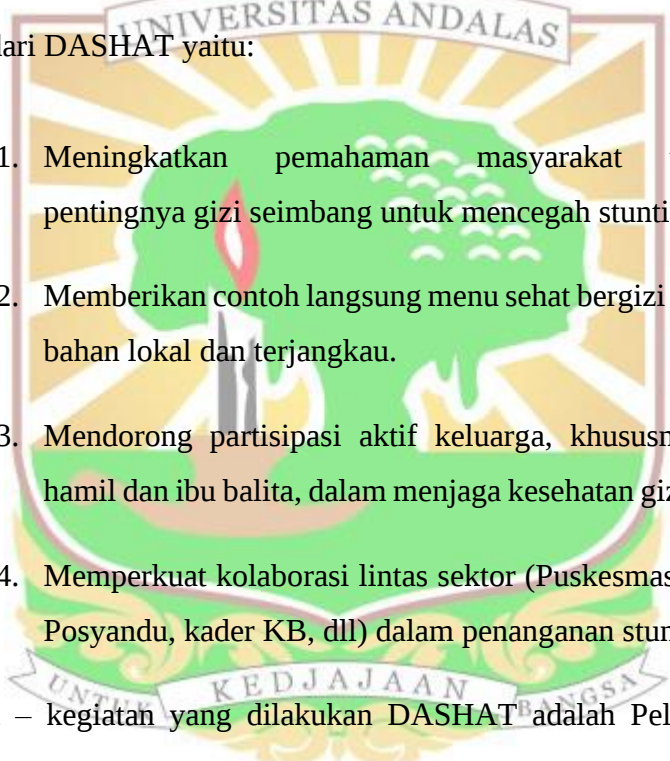
“... Meskipun program Kampung KB bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, partisipasi warga di dalamnya masih rendah. Meskipun ketua kelompok kerja (pokja) sudah aktif menggerakkan, banyak masyarakat hanya tertarik pada kegiatan yang memberikan makanan, cemilan, atau uang. Beberapa pelatihan yang disediakan, seperti menjahit dan membatik, kurang diminati oleh ibu-ibu karena alasan pekerjaan. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang sangat aktif dan selalu hadir di setiap kegiatan atau sosialisasi ...”

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan di Kampung Keluarga Berkualitas terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat. Warga cenderung hanya mau terlibat jika ada imbalan berupa uang atau makanan. Padahal, tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberdayakan mereka melalui pemanfaatan potensi yang ada, bukan sekadar memberi imbalan langsung.

Program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) merupakan salah satu program dari BKKBN yang pelaksanaannya dilakukan di Kampung KB (Keluarga Berkualitas). Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, DASHAT tidak hanya

berfungsi sebagai tempat penyediaan makanan sehat, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan penguatan kapasitas keluarga dalam upaya pencegahan stunting. Kolaborasi antara kader, tokoh masyarakat, puskesmas, dan pemerintah desa menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan program ini. Dashat ditujukan kepada Keluarga yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, yang dilakukan melalui pemanfaatan bahan pangan lokal.

Adapun tujuan dari DASHAT yaitu:

- 
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang untuk mencegah stunting.
 2. Memberikan contoh langsung menu sehat bergizi dengan bahan lokal dan terjangkau.
 3. Mendorong partisipasi aktif keluarga, khususnya ibu hamil dan ibu balita, dalam menjaga kesehatan gizi anak.
 4. Memperkuat kolaborasi lintas sektor (Puskesmas, PKB, Posyandu, kader KB, dll) dalam penanganan stunting.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan DASHAT adalah Pelatihan memasak menu sehat berbasis bahan lokal, Demo masak dan pembagian makanan bergizi untuk keluarga sasaran, Konseling gizi dan pola asuh oleh petugas kesehatan dan kader, Monitoring tumbuh kembang anak di Posyandu dan Pemanfaatan lahan pekarangan untuk sumber pangan rumah tangga.

Untuk menjalankan Program DASHAT di Kampung KB Bukit Karan, terlebih

dahulu melakukan koordinasi kepada pihak yang terlibat dalam program DASHAT. Pihak yang dimaksud seperti Lurah, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Penyuluh KB, Puskesmas dan yang lainnya. Berikut dokumentasi dari kegiatan ini:

Gambar 1.3
Koordinasi Persiapan Program DASHAT



Sumber: Instagram Kampung KB Bukit Karan, 2025

Pada gambar 1.3 dapat dilihat adalah kegiatan dari Koordinasi persiapan Program DASHAT di Kampung KB Bukit Karan. Koordinasi dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program, seperti Lurah, Babinsa, Kepala Puskesmas Rawang, LPM, penyuluh KB kecamatan, Sekretaris Lurah, dan Kasi Kesos Kelurahan Rawang. Dalam foto tersebut terlihat saling berdiskusi untuk mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan program DASHAT dengan baik. Dengan dilakukannya koordinasi dan persiapan yang matang, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Adapun kegiatan yang dilakukan di Kampung Keluarga Berkualitas Bukit

Karan dari Tahun 2023-2025 yaitu:

Kegiatan Tahun 2023

- Gerakan Penghijauan Penanaman bibit produktif seperti durian, petai, jengkol, dan Pinus di sepanjang jalan menuju destinasi wisata Bukit Karan, sebagai upaya penghijauan dan pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif.
- Edukasi Pengelolaan Sampah (EMASkan Sampah)
Kolaborasi dengan MSME Indonesia dan Penggadaian untuk mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan sampah sebagai sumber daya meliputi demo pemilahan sampah, pembuatan kompos, dan kerajinan dari barang bekas.
- Implementasi Modul "Tentang Kita" oleh PIK-R dan Duta GENRE Kota Padang Fokus pada penanaman nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, dan kebhinekaan melalui modul "Tentang Kita".
- Sosialisasi Program DASHAT dan Pos Gizi (Hari ke-3 dan ke-7)
Program "Dapur Sehat Atasi Stunting" dan Pos Gizi mensosialisasi pola asuh, gizi seimbang, dan penanganan stunting kepada orang tua dan keluarga dengan balita.

Kegiatan Tahun 2024

- Budidaya Ikan Nila oleh KUBE Perikanan
Pembuatan kolam dan pembudidayaan ikan nila sebagai sumber ekonomi mandiri masyarakat Kampung KB.
- Pembenahan Area Taman TOGA (Tanaman Obat Keluarga)
Gotong royong membersihkan dan menanam kembali tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan daun sirih di taman TOGA, sebagai upaya kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
- Pengecoran Jalan Masuk RumahData (Gotong Royong)

Masyarakat bersama pemerintah setempat melakukan pengecoran jalan masuk ke gerbang Rumah Data untuk memperbaiki akses dan fasilitas lingkungan.

- Pembuatan Taman oleh Dinas Lingkungan Hidup
Pembersihan lahan, penanaman tanaman hias, dan penataan jalan setapak di area RumahDataku untuk menciptakan lingkungan yang asri dan edukasi lingkungan.
- PAUD: Senam di Alam Terbuka dan Pembelajaran Alam untuk Anak Usia Dini Anak-anak PAUD diajak melakukan senam di alam perbukitan, mengenal tumbuhan dan binatang, serta menuangkan pengalaman mereka melalui gambar dan diskusi.
- PAUD Harapan Ibu: Kegiatan Edukatif di Ruang Prasekolah
Pementasan membaca, bermain kreatif, dan eksplorasi imajinatif di ruang PAUD yang ceria dan mendidik.
- Posyandu Remaja
Sosialisasi kesehatan reproduksi, deteksi dini penyakit, dan edukasi bagi remaja yang diselenggarakan secara rutin bersama PIK-R dan Puskesmas.
- Posyandu Lansia
Pelayanan kesehatan rutin untuk lansia meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, serta penyuluhan gaya hidup sehat.
- Posyandu Balita Rutin
Pelayanan kesehatan dan penyuluhan gizi bagi balita, termasuk edukasi kepada ibu tentang asupan bergizi dan hygiene.

Tahap-tahap pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pokja Kampung KB Bukit Karan dalam penelitian ini, berdasarkan teori Ambar Teguh Sulistyani, meliputi:

1. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Tahap ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri dan mulai mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih positif.

2. Tahap Transformasi Kemampuan

Pada tahap ini, masyarakat dibekali dengan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Proses ini mengubah cara pandang mereka dan memberi mereka kemampuan praktis untuk mengatasi tantangan yang ada.

3. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual dan Keterampilan

Tahap terakhir berfokus pada kemandirian. Peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya diarahkan untuk mendorong masyarakat agar dapat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan dari luar.¹⁰

Dalam tahap penyadaran, tujuan utamanya adalah membentuk perilaku sadar dan peduli agar masyarakat mau meningkatkan kapasitas diri. Pada tahap ini, aktor pemberdayaan (fasilitator) berupaya menciptakan kondisi yang memfasilitasi proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan membuka kesadaran masyarakat tentang kondisi mereka saat ini, sehingga merangsang keinginan untuk memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik. Masyarakat dikatakan sadar dan

¹⁰ Ambar Tegus Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gama Media. Hal 83

peduli jika ada keinginan dari diri sendiri untuk berkembang dan maju dengan melaksanakan program yang telah dibuat. Sebaliknya, mereka dianggap tidak sadar dan tidak peduli jika tidak ada keinginan internal untuk terlibat. Perilaku tidak sadar dan tidak peduli inilah yang sering menjadi indikasi kegagalan sebuah program.

Pada tahap kedua ini, masyarakat menjalani proses transformasi kemampuan dengan belajar dan mengasah keterampilan yang relevan dengan kebutuhan program pemberdayaan. Aktor pemberdayaan, yaitu Pokja Kampung KB, menyediakan berbagai pelatihan seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, dan membatik. Pelatihan tersebut dilaksanakan oleh kader-kader lokal yang telah ditunjuk dan dibekali ilmu secara langsung oleh BKKBN. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan oleh masyarakat.

Pada tahap ketiga, yaitu tahap pengayaan, fokusnya adalah meningkatkan intelektualitas dan keterampilan masyarakat agar mereka bisa mencapai kemandirian. Kemandirian ini terlihat dari kemampuan masyarakat untuk menciptakan kreasi dan inovasi di lingkungan mereka sendiri. Jika masyarakat sudah mencapai tahap ini, mereka dianggap mampu untuk melakukan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan dari luar.

Program Kampung KB adalah langkah pemberdayaan pemerintah yang lebih holistik. Program ini tidak lagi hanya berfokus pada himbauan untuk memiliki dua

anak. Sebaliknya, Kampung KB menjadi program terpadu yang menyeluruh. Program ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti:

- Ekonomi dan peningkatan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan.
- Pendidikan.
- Kesehatan.

Semua elemen ini diintegrasikan ke dalam program Keluarga Berencana yang lebih luas dan komprehensif.

Adapun kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB adalah terkait fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial dan budaya, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Alimami, S.Kep,MARS selaku Kabid KB-K3 Dinas P3AP2KB dalam wawancara peneliti pada tanggal 27 Juni 2023 :

“...Kegiatan kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karaman selain sudah melakukan banyak pelatihan dan penyuluhan, kegiatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ada dibentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) , program untuk menurunkan angka stunting dibentuknya Dashat..dan untuk ketua- ketua kadernya juga sudah diikutkan pelatihan yang diadakan di Dinas P3AP2KB..”(Wawancara dengan Ibu Marni, 27 Juni pukul 09:00).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah sebagai mitra utama dalam pengembangan Program Kampung KB telah memberikan dukungan dan bantuan dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan

infrastruktur, serta program-program pembangunan yang fokus pada keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai hasil dari kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan Rawang, kini terlihat berbagai perubahan positif, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian, serta peningkatan kualitas lingkungan dan budaya lokal.

Berdasarkan dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang”** .

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Merujuk pada paparan yang telah ada, maka diambil rumusan masalah sebagai batasan penelitian yaitu **“Bagaimana Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang? ”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan dari apa yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian, dengan mempertimbangkan masalah yang ada dan

membandingkannya dengan kondisi ideal. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan referensi bagi mahasiswa administrasi publik yang ingin melakukan penelitian serupa di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas Bukit Karan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat dan instansi pemerintah terkait tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan fungsi dan efektivitas program Kampung Keluarga Berkualitas itu sendiri.